



PEMANFAATAN IRIGASI BENDUNGAN: Sejumlah buruh tani menanam bibit padi di persawahan Desa Kliling, Jeloko, Kudus, Jawa Tengah, Jumat (26/7/2024). Meskipun musim kemarau para petani di wilayah itu masih dapat menanam padi pada masa tanam ketiga atau tiga kali panen dalam setahun dengan memanfaatkan pengairan irigasi dari bendungan Logung yang telah selesai dibangun oleh Kementerian PUPR pada 2018.

KR-Antara/Yusuf Nugroho

KENDALIKAN HARGA CABAI

Pasar Murah Jadi Strategi Jangka Pendek

YOGYA (KR) - Kenaikan harga cabai di pasaran yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir masih menjadi persoalan bagi para pedagang dan konsumen. Padahal sejumlah upaya sudah dilakukan oleh pemerintah maupun stakeholder terkait untuk meredakan kenaikan harga cabai, tapi hasilnya belum sesuai harapan. Bahkan Pemda DIY sempat mengalami kesulitan dalam mengendalikan harga cabai yang terus fluktuatif tersebut.

"Komoditas cabai termasuk gampang busuk dan tidak tahan lama, sehingga menjadikan kami agak kesulitan dalam mengendalikan harganya. Karena saat masa panen raya petani, distributor atau pemerintah tidak bisa melakukan stok barang. Dari sisi teknologi juga belum bisa menyimpan cabai saat panen raya, kemudian dikeluarkan saat stok menipis di petani. Itu yang kemudian kalau kami intervensi pun tidak banyak," kata Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian DIY Syam Arjayanti di Yogyakarta, Jumat (26/7).

Syam mengatakan, untuk menekan harga jual cabai di pasaran, pihaknya menjalin kerja sama langsung di tingkat petani. Rantai pasokan distribusi bahan pokok dipangkas agar biaya yang ditimbulkan bisa diminimalkan. Misalnya dengan transaksi lang-

sung antara distributor dengan petani, sehingga harga jadi lebih murah. Namun hal itu hanya bisa menyediakan untuk konsumen akhir di pasar murah. Jadi kalau sampai ke pasar tradisional hal tersebut belum bisa dilakukan.

"Untuk sementara aksi pasar murah masih menjadi salah satu strategi penanggulangan jangka pendek saat harga komoditas bahan pokok mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan. Hanya saja jumlah komoditas yang dijual juga terbatas dan tidak selengkap di pasar," ungkapnya.

Syam menambahkan, sejumlah upaya terus dilakukan oleh Pemda DIY untuk menekan kenaikan harga kebutuhan pokok di pasaran. Salah satu program yang masih dijalankan Pemda DIY sejak dua tahun terakhir yaitu subsidi transportasi pada komoditas bahan pokok. Walaupun hasilnya belum bisa dikatakan optimal, karena belum terlalu berpengaruh untuk menekan harga jual di tingkat pedagang. Adapun anggaran yang ditetapkan untuk subsidi transportasi itu sebesar Rp 1 miliar setiap tahunnya sejak 2023 bagi seluruh bahan pokok yang rentan terhadap lonjakan inflasi. "Kalau untuk saat ini subsidi yang diberikan sebesar Rp 2.000 per kg, tapi belum memberikan pengaruh yang signifikan," pungkasnya. **(Ria)-f**

KASUS PEMBAKARAN RUMAH WARTAWAN

LPSK Lindungi Keluarga dan Saksi

JAKARTA (KR) - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memberikan perlindungan terhadap keluarga dan saksi kasus Rico Sempurna Pasaribu, wartawan yang tewas bersama keluarganya dalam kebakaran rumah di Karo, Sumatera Utara. Tiga orang yang mendapatkan perlindungan dari LPSK yakni berinisial EM, RF dan VS.

"Permohonan perlindungan telah memenuhi persyaratan perlindungan se-

suai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU Nomor 31 tahun 2014," kata Wakil Ketua LPSK Wawan Fahrudin dalam siaran pers, Jumat (26/7).

Wawan menjelaskan, mereka telah mengajukan permohonan perlindungan kepada LPSK sejak 4 Juli 2024 lalu melalui kuasa hukumnya. Permohonan perlindungan itu pun langsung ditelaah oleh pihak LPSK hingga akhirnya disetujui hari ini.

"Ketiganya mendapatkan perlindungan

dan fisik berupa pengamanan dan pengawasan saat persidangan dan ketika ketiganya memberikan keterangan dalam setiap proses peradilan pidana. Selain itu, pihak LPSK juga memberikan fasilitas restitusi dan bantuan biaya hidup sementara," katanya.

Dengan adanya perlindungan ini, Wawan berharap korban dan saksi tetap merasa aman. Sehingga tidak ada tekanan dalam membikin keterangan kepada penyidik. **(Ant/Has)-f**

Menteri Sambungan hal 1

Pemeriksaan terhadap Trenggono adalah sebagai saksi. Ia menjalani pemeriksaan pada pukul 08.50 WIB dan selesai diperiksa pukul 11.25 WIB.

Trenggono juga menepis tudingannya adanya aliran uang kepada dirinya terkait dengan perkara yang tengah disidik oleh KPK. "Enggak ada itu, enggak ada," ujarnya.

Sebelumnya Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto mengatakan Menteri Trenggono memenuhi panggilan penyidik KPK. Ia akan diperiksa sebagai saksi penyidikan perkara dugaan korupsi.

"Yang bersangkutan hadir di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 08.50 WIB dan naik ke ruang pemeriksaan pada pukul 08.55 WIB," tuturnya.

Tessa Mahardika membenarkan soal kehadiran Sakti Wahyu Trenggono di

Gedung Merah Putih KPK. "Iya betul, yang bersangkutan hadir ke Gedung Merah Putih KPK," katanya saat dikonfirmasi wartawan.

Awalnya penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Trenggono pada hari Jumat (12/7). Namun, yang bersangkutan tidak hadir dan baru hari ini memenuhi panggilan penyidik KPK.

Trenggono dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa. Meski demikian, KPK belum menerbitkan informasi yang akan dialami penyidik dalam pemeriksaan terhadap Trenggono.

KPK juga belum memerinci soal kasus yang membuat Trenggono dipanggil oleh KPK. Sesuai dengan kebijakan KPK, seluruh rangkaian dan detail perkara tersebut akan dibuka ke publik setelah penyidikan rampung. **(Ful)-f**

Maju Pilkada, 30 ASN Mengundurkan diri

SUMEDANG (KR) - Mendagri Muhammad Tito Karnavian menyatakan, sampai saat ini ada 30 aparatur sipil negara (ASN) yang mengajukan pengunduran diri karena maju atau ikut daftar menjadi peserta dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2024. "Sudah 30-an yang mengajukan pengunduran diri, dan kami sedang proses, ada yang sudah kita ganti, seperti Papua Selatan," kata Tito Karnavian setelah memberikan pembekalan kepada calon wisudawan IPDN tahun akademik 2023/2024 di Kampus IPDN Jatinangor Kabupaten Sumedang, Jumat (26/7).

Ia menuturkan, bagi ASN maupun yang

saat ini menjabat sebagai pejabat kepala daerah sesuai aturan harus memberitahukan untuk mengajukan pengunduran diri, apabila akan maju pilkada. ASN yang akan maju pada pilkada itu, jelasnya, akan dikeluarkan surat keputusan pemberhentian jabatannya dan untuk saat ini Kemendagri sedang tahap proses pemberhentian sekaligus mencari penggantinya dalam waktu secepatnya. "Yang lain sedang kita proses pemberhentiannya, dan sekaligus mencari penggantinya dalam waktu secepat mungkin," katanya.

Ia mengimbau pejabat kepala daerah lainnya yang memiliki keinginan untuk maju

dalam pilkada agar secepatnya memberi tahu ke Kemendagri supaya bisa secepatnya dicari penggantinya.

Jika ASN tidak mengajukan pengunduran diri, kemudian Kemendagri mengetahui lebih dulu hal itu, maka sesuai aturan akan langsung memberhentikan jabatannya tersebut. "Kepada PJ yang lain sama, yang lain yang akan ikut dalam pilkada saya minta secepat mungkin memberi tahu kepada kita, jangan sampai yang tahu kami duluan, kalau sudah pasti akan mendaftar, kemudian tidak memberitahu kita, ya kami yang akan memberhentikan," jelasnya. **(Ant)-f**

Sambungan hal 1

Sebenarnya, kalau Pemerintah serius melakukan pembatasan BBM Subsidi dapat digunakan kriteria sederhana yang dapat dengan mudah diterapkan di SPBU. Tetapkan saja kriteria kendaraan yang boleh membeli BBM Subsidi adalah sepeda motor, mobil angkutan orang dan barang, di luar kriteria itu konsumen harus membeli BBM non-subsidi. Migrasi dari BBM Subsidi ke BBM non-subsidi memang terjadi kenaikan harga, tetapi kenaikan harga itu dilokalisasi dan tidak dilakukan serentak, sehingga tidak menimbulkan efek terhadap kenaikan inflasi dan penurunan daya beli secara signifikan.

Mengingat beban BBM subsidi semakin membengkak, pembatasan BBM subsidi harus dilakukan dalam waktu dekat ini, bahkan sebelum Jokowi lengser pada Oktober 2024. Keberanian Jokowi dalam memutuskan pembatasan BBM subsidi itu akan menjadi legasi pada saat mengakhiri kekuasaannya, sembari mengurangi beban APBN bagi Pemerintahan Prabowo-Gibran.

(Penulis, Dosen DEB Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada dan Pengurus ISEI DIY)-f

Pembatasan Sambungan hal 1

Tak berapa lama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa pemerintah tidak berencana membatasi BBM bersubsidi pada 17 Agustus 2024. Penyangkalan serupa juga dilakukan oleh Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif dan Menteri BUMN Eric Thohir. Bahkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga ikut menyangkal pernyataan Luhut dengan mengatakan bahwa pembatasan BBM Subsidi belum terpicik.

Silang pendapat antara Jokowi dengan Luhut dan beberapa Menteri dengan Luhut terkait isu penting pembatasan BBM Subsidi, mengindikasikan bahwa koordinasi Kabinet Pemerintahan Jokowi amat buruk.

Pembahasan rencana pembatasan BBM Subsidi sesungguhnya sudah dibahas dalam Kabinet Jokowi sejak tiga tahun lalu, namun hingga detik ini belum juga diterapkan.

Terlepas dengan silang pendapat antara Menteri, upaya pembatasan BBM Subsidi sudah sangat urgen dan mendesak. Pasalnya, jumlah beban subsidi BBM yang salah sasaran sudah sangat besar, sekitar 80 persen dari to-

tal Subsidi Energi.

Menurut data Kementerian ESDM, jumlah realisasi Subsidi Energi pada 2023 mencapai Rp 159,6 triliun, di antaranya salah sasaran sebesar Rp. 127,68 triliun. Salah satu penyebab tidak segera diterapkan pembatasan BBM Subsidi adalah belum adanya kesepakatan penggunaan mekanisme pembatasan BBM Subsidi.

Pada saat itu, Pertamina mengusulkan untuk menggunakan aplikasi MyPertamina untuk pendaftaran konsumen yang berhak membeli BBM Subsidi. Setelah uji coba, penggunaan MyPertamina dibatalkan, lantaran tidak semua konsumen BBM Subsidi bisa mengakses aplikasi MyPertamina dan tidak semua SPBU di seluruh wilayah Indonesia memiliki akses internet untuk pendaftaran. Lalu diwacanakan untuk membatasi BBM Subsidi dengan menetapkan kriteria kendaraan besilinder di bawah 1500 cc untuk mobil dan 250 cc untuk sepeda motor.

Namun, penetapan kriteria itu tidak mudah diterapkan di SPBU, bahkan hanya akan merepotkan bagi petugas SPBU, yang berpotensi terjadi moral hazard di SPBU.

PBNU Sambungan hal 1

Sementara itu, Tim Lima tersebut menyerupai Tim Lima yang dahulu pernah dibentuk PBNU di awal reformasi ketika dirikan PKB. Tim Lima itu, segera diwujudkan jika mendapatkan persetujuan dari Rais Aam KH Miftachul Ahyar dan Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf.

"Kami akan undang bergabung seluruh tokoh, para aktivis NU untuk dimintai pendapatnya terkait hal ini," ucap Gus Ipu.

Sementara itu, Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar saat memberikan pembekalan kepada seluruh anggota legislatif PKB dari Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau dan Provinsi Riau dalam Sekolah Pimpinan Perubahan Wilayah 4 di Berastagi Karo, kemarin menegaskan, sejak awal PKB didirikan, disusun dan dibuat dari NU untuk diabdikan kepada rakyat dan bangsa Indonesia.

"Jadi bukan untuk NU pribadi, tapi seluruh bangsa Indonesia dan untuk berkebarnya Merah Putih bagi kejayaan Indonesia," kata Cak Imin.

Muhaimin juga menyebutkan, PKB bukan hanya untuk umat muslim saja, tetapi seluruh rakyat Indonesia. Hal itu ia buktikan ketika meminta anggota legislatif dari PKB yang tidak beragama Islam mengangkat tangannya.

"Ini membuktikan PKB untuk seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, mari niatkan setiap kelelahan yang kita abdikan, se-

tiap waktu yang akan kita habiskan semuanya benar-benar untuk kepentingan rakyat. Dengan niat yang tulus karena merah putih kita tidak terbang karena dipuja, tidak tumbang karena dihina," ucapnya. Ia berpesan agar seluruh anggota legislatif dari PKB di seluruh tanah air bersatu karena masa depan partai ada di tangan mereka. **(Ant/Obi)-f**



Prakiraan Cuaca Sabtu, 27 Juli 2024					
Lokasi	Pagi	Siang	Malam	Suhu C	Kelembaban
Bantul	☁	☁	☁	22-30	65-95
Sleman	☁	☁	☁	22-29	65-95
Wates	☁	☁	☁	22-29	65-95
Wonosari	☁	☁	☁	22-30	65-95
Yogyakarta	☁	☁	☁	22-30	65-95

Zahrotus Sa'idah, SIKom MA
Dosen Ilmu Komunikasi
Universitas Amikom Yogyakarta

BARU-BARU ini, masyarakat di berbagai daerah di Indonesia dihebohkan oleh penamaan sejumlah aplikasi pelayanan publik yang dianggap vulgar. Polemik ini menimbulkan banyak pertanyaan tentang etika dan moral dari

Cek Aplikasi (Nama Vulgar) Sebelah

pemerintah daerah yang bersangkutan. Melalui media sosial, beragam aplikasi ini menjadi perbincangan hangat, memicu kontroversi dan kritik dari berbagai kalangan. Misalnya, di Surakarta, Pemkot setempat meluncurkan aplikasi "Simontok" yang merupakan singkatan dari Sistem Monitoring Stok dan Kebutuhan Pangan. Nama ini, meskipun terdengar catchy, akan tetapi mendapat reaksi negatif karena konotasi vulgar yang melekat pada kata tersebut. Di Pemalang, ada aplikasi "Sisemok" (Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan), dan di Cirebon, Pemkab setempat memperkenalkan "Sipepek" (Sistem Pelayanan Program Penanggulangan Kemiskinan dan Jaminan Kesehatan). Nama-nama ini, meskipun mungkin dimaksudkan untuk mudah diingat, namun dianggap tidak pantas dan tidak sesuai dengan norma kesopanan dalam pelayanan publik.

Kelapa Sawit-Sapi Berbasis Kemitraan Usaha Ternak Inti Plasma) dari Pemprov Kalimantan Selatan, dan "Mas Dedi Memang Jantan" (Program Masyarakat Berdedikasi Memperhatikan Angkatan Kerja Rentan) dari Pemkot Tegay juga menjadi sorotan. Nama-nama program ini mengundang kritik karena dianggap patriarkis dan merendahkan. Polemik ini menyoroti beberapa isu penting. Pertama, dari segi etika, penggunaan nama-nama vulgar dan patriarkis ini menunjukkan kurangnya pertimbangan etis dari pemerintah daerah.

profesional dan tidak serius dalam memberikan pelayanan. Kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik juga bisa menurun, karena nama-nama ini menimbulkan kesan bahwa pemerintah daerah tidak memiliki etika dan moral yang baik.

Selain itu, kontroversi yang ditimbulkan oleh nama-nama vulgar ini juga dapat mengalihkan perhatian dari tujuan utama aplikasi, yaitu memberikan pelayanan yang efektif dan efisien kepada masyarakat. Masyarakat mungkin lebih fokus pada kontroversi daripada manfaat yang sebenarnya ditawarkan oleh aplikasi tersebut. Untuk mengatasi masalah ini, ada beberapa langkah yang dapat diambil.

Pertama, pemerintah daerah perlu melakukan rebranding atau penggantian nama aplikasi dan program yang dianggap vulgar. Nama-nama baru yang dipilih harus lebih sopan dan profesional, serta mencerminkan tujuan dan fungsi dari aplikasi atau program tersebut.

UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA
Creative Economy Park

vulgar, pemerintah daerah juga perlu segera mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki situasi. Rebranding dengan nama-nama yang lebih sopan dan profesional, konsultasi dengan berbagai pihak untuk memastikan kesesuaian nama dengan norma dan nilai yang berlaku, serta pelatihan etika dan moral bagi para pegawai adalah beberapa solusi yang dapat diimplementasikan. Langkah-langkah ini diharapkan mampu mengembalikan kepercayaan masyarakat dan memperbaiki citra pelayanan publik. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat menunjukkan komitmen dan profesionalisme dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, tanpa menimbulkan kontroversi yang tidak perlu.

Selain itu, dalam menghadapi polemik penamaan aplikasi pelayanan publik yang